

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat Indonesia merupakan kehidupan yang sangat kompleks dengan adanya berbagai masalah sosial yang melanda beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Adanya berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat itu sendiri membuat mereka hidup yang tidak normal atau tidak semestinya seperti rendahnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Permasalahan sosial merupakan salah satu wujud dari dampak negatif ilmu sosial. Permasalahan sosial adalah beberapa kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang sehingga mengakibatkan kekecewaan dan penderitaan. Permasalahan sosial itu muncul karena juga dipengaruhi oleh tidak meratanya kesejahteraan sosial, dimana seseorang atau masyarakat yang tidak mendapatkan kehidupan sosial yang layak (Soekanto 2001:30).

Seseorang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial bisa disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara

memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, kesejahteraan, dan perubahan lingkungan secara mendadak (Kementrian Sosial RI). Dalam hal ini yang sering mengalami permasalahan sosial biasanya adalah kaum perempuan, salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK) (Soekanto 2001:40).

Tatanan moral kemanusiaan, praktik prostitusi menjadi salah satu persoalan utama yang membutuhkan suatu penanganan serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikannya dalam kehidupan masyarakat terutama di kota besar. Hal ini merupakan sebuah pola bertahan hidup bagi sebagian masyarakat dalam menyikapi kerasnya kehidupan melalui pekerjaan yang berpengaruh buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, keberadaan praktik prostitusi tetap menjadi eksploitasi seks yang dikomersialisasikan oleh sebagian kepentingan orang yang disebut mucikari atau germo dengan mempekerjakan para pelaku seks yaitu pelacur (masyarakat Gresik menyebutnya “balon”) yang biasa disebut menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) (Hasil wawancara dengan Bapak Edy (mantan mucikari), tanggal 25 -12-2017, jam 14.30).

Profesi pelacuran menurut Kartini Kartono (2011) merupakan profesi yang sangat tua usianya, setara kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran juga sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks demi imbalan uang (Koendjoro, 2004:30). Tidak

hanya itu, Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan sebuah profesi yang diartikan kurang beradab dan dianggap dapat mendatangkan penyakit oleh pemikiran masyarakat secara awam.

Menurut informasi (Detik.com:2014) menyatakan bahwa Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial Kementerian Sosial, Sonny W Manalu, mengatakan saat ini terdapat 40 ribu lebih pekerja seks komersial (PSK) yang menghuni lokalisasi di seluruh Indonesia. Dari target 100 titik lokalisasi prostitusi yang hendak dihapuskan, pemerintah berhasil menutup 116 lokalisasi prostitusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap tahun jumlahnya selalu naik. (kata Sonny saat berada di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, 16 April 2014). Menurut Sonny, dari jumlah tersebut, 7.500 orang di antaranya menghuni lokalisasi di berbagai daerah di Jawa Timur. Sonny meminta pemerintah daerah lebih pro-aktif mengurangi jumlah PSK (<https://news.detik.com/berita/2614608/ini-data-dan-persebaran-161-lokalisasi-di-indonesia>).

Menurut informasi (Detik.com:2014) menyatakan bahwa Kementerian Sosial siap membantu penanganan PSK yang berniat meninggalkan profesinya. Sony mengatakan mungkin belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak terdapat lokalisasi prostitusi. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Sosial, ada 168 lokalisasi di Indonesia yang dihuni sekitar 30 ribu orang. Bahkan pada 2015, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memerintahkan Ditjen

Rehabilitasi Sosial membuat Rakornas dengan mengumpulkan seluruh pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota yang wilayahnya terdapat lokalisasi prostitusi (<https://news.detik.com/berita/2614608/ini-data-dan-persebaran-161-lokalisasi-di-indonesia>).

Informasi dari (Tempo.co: 2013) menyatakan Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah percontohan yang sukses menutup lokalisasi. Karena itu Kementerian Sosial menanggung biaya keterampilan dan modal usaha bagi mantan PSK dengan anggaran Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per orang. Kami juga berikan biaya jaminan hidup selama tiga bulan. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, Syaiful Alam, mengatakan tahun ini akan menutup 11 lokalisasi yang masih beroperasi di daerahnya. Sebanyak 190 PSK akan dibekali keterampilan khusus, seperti tata rias, tata boga dan menjahit. Berikut persebaran lokalisasi dan jumlah yang sudah ditutup berdasarkan data Kemensos tahun 2012 hingga tahun 2014 (<https://nasional.tempo.co/read/473745/40-juta-psk-menghuni-lokalisasi-di-seluruh-indonesia>) :



Sumber : Detik News.2014 (www.wavienews.com)

Pelacuran merupakan profesi tertua di dunia yang nampaknya sulit dihilangkan selama hukum penawaran dan permintaan tetap berlaku untuk melegitimasi ruang gerak pelacuran. Semua itu tetap tidak banyak berarti mencegah makin menjamurnya praktik-praktik prostitusi (Bagong, Suryanto 1997:45). Makin maraknya praktik prostitusi yang legal maupun ilegal membuat pemerintah melakukan tindakan khusus dan tegas dengan penertiban secara bertahap sehingga berujung dengan penutupan prostitusi tersebut. Hal ini juga bisa menjadi tindakan yang efektif dan komprehensif, namun bisa juga terjadi sebaliknya.

Adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) ditengah masyarakat maka dianggap sebagai permasalahan sosial dan sangat mengganggu masyarakat disekitarnya atau sebagai sumber penyakit sosial di masyarakat. (Soedjono D, 1982: 126) juga mengemukakan bahwa akibat negatif dari adanya praktik tersebut adalah :

1. Dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kulit, kelamin, dan sejenisnya.
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga.
3. Merusak sendi-sendi pendidikan moral, bertentangan dengan norma-norma agama, norma sosial, dan norma hukum.
4. Terjadinya penularan virus HIV.

Adanya permasalahan atau fenomena tersebut perlu adanya kebijakan serta penanganan mengenai rehabilitasi sosial untuk para Pekerja Seks Komersial

(PSK). Kebijakan atau penanganan tersebut mengenai usaha penyembuhan dan pemulihan para Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui pembinaan atau bimbingan agar mereka dapat hidup secara wajar dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan hidup sehat tentunya. Dalam hal ini diharapkan kerjasama semua pihak, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah maupun peran masyarakat untuk ikut dalam mengentaskan permasalahan sosial yang salah satunya adalah Pekerja Seks Komersial (PSK). Maka dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya Eks Pekerja Seks Komersial (PSK). Kementrian Sosial mempunyai tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat dengan mengedepankan penanganan sosial khususnya di bidang rehabilitasi sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pemberdayaan sosial bagia para Pekerja Seks Komersial (PSK). Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat juga mempunyai tanggung jawab dalam mengatasi hal tersebut, sesuai kebijakan yang tecantum dalam :

1. Keputusan Menteri Sosial RI No. 20/HUK/1999, tentang Rehabilitasi Sosial penyandang masalah Tuna Susila.
2. Keputusan Menteri Sosial No. 06/HUK/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
3. Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan Sosial.

Hal ini pelaksanaan penanganan Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) pada tingkat Provinsi adalah tugas dari Pemerintah Provinsi beserta daerah setempat yang secara fungsional baik bersifat kuantitas atau kualitas rehabilitasi Eks

Pekerja Seks Komersial (PSK). Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan Pemerintah Jawa Timur merupakan pemerintah provinsi yang menangani permasalahan sosial yang salah satunya adalah para Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu dengan cara rehabilitasi Sosial.

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita di Kediri adalah tempat dimana para Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) atau perempuan-perempuan yang mempunyai permasalahan sosial termasuk Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk melayani atau memberi bimbingan agar Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) mejadi masyarakat yang mandiri, berdaya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya seperti masyarakat pada umumnya. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri memiliki tanggung jawab dan tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di bidang pelayanan rehabilitasi, bantuan, bimbingan, pengembangan dan resosialisasi (UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri).

Maka dengan kewenangan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelayanan sosial.
2. Melaksanakan rehabilitasi dan pembinaan lanjut.
3. Melaksanakan praktek pekerjaan sosial bidang rehabilitasi Eks Tuna Susila.
4. Melaksanakan ketata usahaan.

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
6. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi dilakukan untuk Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) agar mereka dapat memiliki rasa percaya diri, kemauan, kemampuan dalam menghadapi kehidupan dan penghidupan. Seperti Visi dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri yaitu terwujudnya tata kehidupan yang normatif bagi wanita rawan sosial penyandang masalah dan Misinya yaitu meningkatkan sumber daya wanita melalui bimbingan sosial, fisik, mental, juga pelatihan ketrampilan (UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri).

Kegiatan rehabilitasi ini juga bertujuan untuk terhindarnya masyarakat rentan terhadap perbuatan Tuna Susila, tercapainya kembali pemulihan harga diri, tanggung jawab sosial serta tumbuhnya kemauan dan berkemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya WTS dan dapat serta membina Eks Pekerja Seks Komersial (PSK). Rehabilitasi di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri ini meliputi :

1. Bimbingan Mental
2. Bimbingan Sosial
3. Bimbingan Fisik
4. Bimbingan Keterampilan

Rehabilitasi UPT melakukan perannya sesuai dengan pergub no. 199 tahun 2008 tersebut. Peran UPT disini adalah melakukan persiapan sebelum kegiatan bimbingan-bimbingan dilakukan persiapan tersebut meliputi penyiapan tempat bimbingan, mempersiapkan kerja sama dengan instruktur masing-masing bimbingan dan menyiapkan peralatan atau fasilitas yang mungkin akan digunakan dalam pelaksanaan bimbingan. Persiapan tersebut dilakukan agar setiap pelaksanaan bimbingan yang ada dapat berjalan dengan baik dan optimal dan jika semua bimbingan berjalan dengan baik maka peran UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri secara keseluruhan akan optimal dan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Pelaksanaan bimbingan yang ada di UPT juga melakukan sebuah pengawasan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian latihan atau pembinaan pada Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) berjalan dengan baik atau tidak dan telah sesuai program yang dibuat UPT atau tidak. Pelaksanaan rehabilitasi Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di UPT tidak begitu saja dilakukan pada Eks WTS, tetapi Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) yang akan direhabilitasi tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang telah ada. Dalam program UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri ini memiliki syarat khusus untuk calon klien atau Pekerja Seks Komersial (PSK) yang akan direhabilitasi dimana persyaratannya tersebut yaitu :

1. Berusia 18-60 tahun
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Tidak sedang berurusan dengan kepolisian

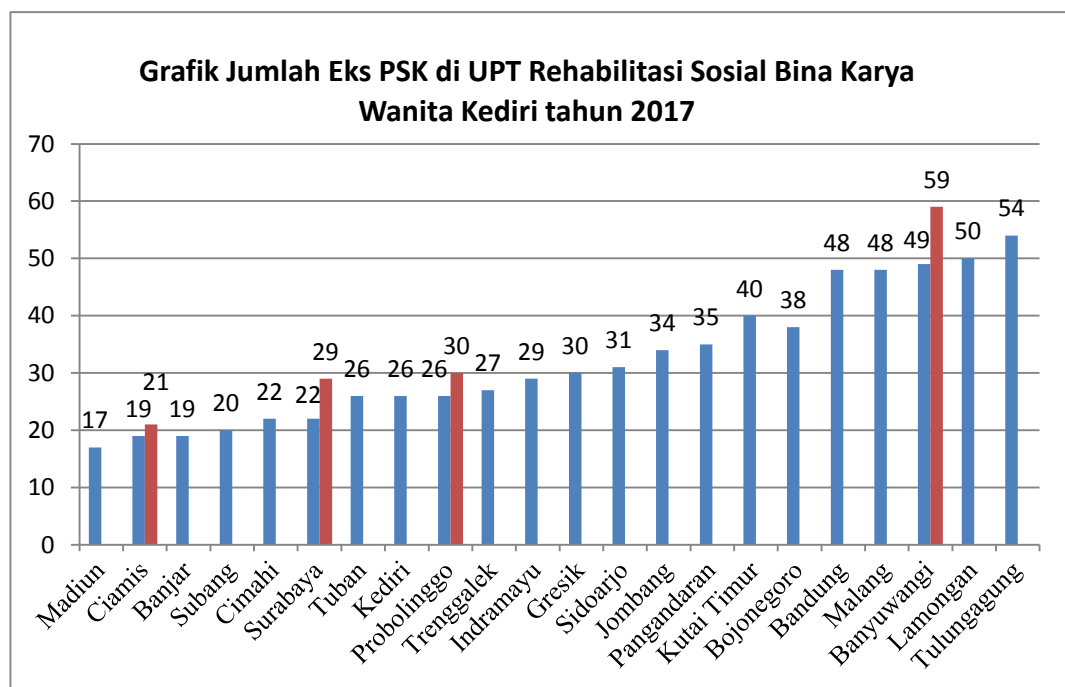
4. Wajib tinggal di asrama dan mematuhi ketentuan yang berlaku
5. Wajib mengikuti program bimbingan sosial, fisik, mental, dan ketrampilan selama 4 bulan
6. Surat pengantar dari Kabupaten atau Kota daerah pengirim

Selama dalam masa rehabilitasi para Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) akan mendapatkan pelayanan di UPT termasuk adanya kegiatan pelatihan atau pembekalan. Lama pelatihan dan pembekalan kompetensi atau bimbingan tersebut adalah selama 4 bulan, artinya para Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) akan ditempatkan dalam satu asrama atau panti dengan jumlah untuk satu angkatan adalah 60 klien yang di dalamnya terdapat Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) dan juga Tuna Susila lainnya seperti korban kekerasan dan lain sebagainya. Selama 4 bulan tersebut Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) dibina atau dibimbing serta diberikan bekal keterampilan agar Eks WTS tersebut bisa menjadi masyarakat lebih baik lagi, terlebih bisa mandiri, berdaya dan tidak menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) kembali (Hasil wawancara dengan Ibu Rini W. Antarlina, SH, MSi (selaku seksi pelayanan di UPT RSBKW), tanggal 27 -12-2017, jam 14.30).

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri ini hanya sebagai pelaksana rehabilitasi pada Tuna Susila serta Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) yang artinya bahwa para Tuna Susila atau yang dimaksud adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berasal dari hasil razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota atau Kabupaten di Jawa Timur serta beberapa Pekerja Seks Komersial (PSK) yang datang dengan sendirinya untuk mengikuti

rehabilitasi. Sehingga peranan UPT disini hanya pada pelaksanaan rehabilitasi yang ada, baik kegiatan persiapannya hingga dalam pelaksanaan pemberian bimbingan pada Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) (Hasil wawancara dengan Ibu Rini W. Antarlina, SH, MSi (selaku seksi pelayanan di UPT RSBKW), tanggal 27 -12-2017, jam 14.30).

Kegiatan persiapan hingga pelaksanaan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Provinsi Jawa Timur juga selalu melakukan pendataan Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) sebelum direhabilitasi, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada serta mengetahui darimana asalnya Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) yang akan mengikuti rehabilitasi. Seperti yang dapat dilihat pada data jumlah Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) angkatan III bulan September 2017.



Sumber : UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri, September tahun 2017

Berdasarkan grafik jumlah Eks PSK tahun 2017 diatas menunjukkan bahwa kota Banyuwangi, Probolinggo, Ciamis dan Surabaya terdapat Eks PSK jumlah paling banyak. Kemudian, dari kota Tulungagung, Lamongan, Malang, Bandung, Bojonegor, Kutai Timur, Pangandaran, Jombang, Sidoarjo, Gresik, Indramayu, Trenggalek, Kediri, Tuban, Subang, Banjar, Madiun terdapat Eks PSK dengan terkecil. Diagram diatas juga dapat dilihat bahwa umur mereka rata-rata di bawah 35 tahun. Dari sisi umur tersebut memang mereka masih tergolong muda, sehingga mungkin dengan alasan tersebut mereka masih tetap menjajakan diri sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), tetapi tidak menutup kemungkinan juga karena masalah ekonomi atau pendidikan yang rendah dan lain sebagainya.

Seiring berjalannya kegiatan rehabilitasi Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) yang salah satunya dilakukan oleh UPT tersebut maka jumlah Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jawa Timur mulai berkurang. Kegiatan pembinaan atau bimbingan dan ketrampilan ini mempunyai tujuan khusus yaitu memulihkan kembali harga diri, sikap perilaku dan peran sosial dalam masyarakat sehingga para Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak akan bekerja menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) lagi.

Setelah memaparkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan, hal ini menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul “Gambaran Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita di Kediri : Khususnya Bimbingan Mental EKS PSK”.

1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti, diantaranya:

1. Penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh Ari Hardiawan (2015) dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Pembinaan Dinas Sosial Pada Wanita Pekerja Seks di Kota Cilegon”. Penelitian dari jurusan Ilmu Administrasi Negara ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori Duncan, yakni pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi yang membahas tentang efektifitas pembinaan yang diberikan kepada wanita pekerja seks di Kota Cilegon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program pembinaan wanita pekerja seks Kota Cilegon. Penelitian ini menghasilkan penelitian berupa masih kurangnya waktu pelaksanaan program rehabilitasi, anggaran yang belum cukup untuk pembangunan panti rehabilitasi, tidak adanya pengawasan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dan masih belum tepatnya cara sosialisasi kepada wanita pekerja seks.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari segi tujuan dan hasil penelitian. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pemberian pelaksanaan bimbingan mental pada Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di UPT RSBKW di Kediri. Kemudian, hasil penelitian ini terdapat pengawasan yang sangat ketat dari pihak UPT RSBKW diantaranya dari petugas keamanan dan para instruktur yang memberikan program

bimbingan. Adapun cara sosialisasi yang diberikan oleh pihak UPT RSBKW yakni, pada awal subjek masuk untuk menjalani rehabilitasi subjek sudah diberikan arahan untuk memilih berbagai bimbingan ketrampilan yang ada serta wajib mengikuti jadwal kegiatan dari setiap bimbingan yang diberikan.

2. Penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh Muhammad Muttaqin (2010) dengan penelitian yang berjudul “Pola Penanganan WTS Oleh UPT Rehabilitasi Tuna Susila di Kabupaten Kediri”. Penelitian dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dan menggunakan teori pekerjaan sosial. Penelitian ini menghasilkan penelitian pola penanganan yang dilakukan oleh UPT rehabilitasi tuna susila tidak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh para wanita tuna susila, karena proses penanganan para tuna susila tidak berawal dari indentifikasi masalah yang dialami para wanita tuna susila sehingga penanganan para wanita tuna susila tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan dua penelitian diatas, bahwa penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui pemberian pelaksanaan bimbingan mental pada Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di UPT RSBKW di Kediri. Kemudian, hasil penelitian ini terdapat pengawasan yang sangat ketat dari pihak UPT RSBKW diantaranya dari petugas keamanan dan para instruktur yang memberikan program bimbingan. Adapun cara sosialisasi yang diberikan oleh pihak UPT RSBKW yakni, pada awal subjek masuk untuk menjalani

rehabilitasi subjek sudah diberikan arahan untuk memilih berbagai bimbingan ketrampilan yang ada serta wajib mengikuti jadwal kegiatan dari setiap bimbingan yang diberikan. Pada saat pola penanganan bimbingan mental yang diberikan oleh UPT RSBKW di Kediri kepada Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) memberikan sarana dan prasarana yang mendukung seperti ruangan kelas yang digunakan untuk para Eks PSK saat bimbingan mental diberikan. Kemudian, instruktur-instruktur yang kompeten dengan pemberian materi yang beragam kepada para Eks Pekerja Seks Komersial (PSK).

1.3 Fokus masalah

Sebuah penelitian fokus masalah sangat diperlukan agar penelitian dapat terarah, sehingga mencapai hasil penelitian yang baik dan sesuai harapan. Penelitian ini memfokuskan pada gambaran pelaksanaan bimbingan mental dari UPT Rehabilitasi Tuna Sosial Bina Karya Wanita di Kediri terhadap Eks Pekerja Seks Komersial (PSK).

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan mental pada Eks WTS di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita kediri ?
2. Bimbingan manakah yang sesuai untuk para Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita kediri ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan mental pada Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita kediri dan bimbingan yang sesuai untuk para Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita kediri.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang Psikologi Sosial dan dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi pembaca.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai gambaran kehidupan pembinaan Eks PSK khususnya Bagaimana pelaksanaan bimbingan mental pada Eks WTS di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita kediri dan bimbingan yang sesuai untuk para Eks WTS di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita kediri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan mengenai Bimbingan Mental Rehabilitasi dan sosial Eks PSK di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita di kediri.